

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa dan harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintah desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. (Francisco, 2015:2)

Demikian halnya dengan pembangunan desa dan masyarakatnya merupakan suatu proses perubahan dan pembaharuan yang berlangsung di desa dan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara berencana dan bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa.

Pembangunan di wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa.

Bratakusumah (1999) mengatakan bahwa paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai *Intermediasi* dan *Katalisator* segenap perencanaan pembangunan. Artinya pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat, didalam menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Dengan kata lain bagaimana mengkondisikan agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai subyek pembangunan yang dominan menentukan keberhasilan pembangunan. (Melis 2016:1)

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung program dan tujuan pemerintah yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola oleh masyarakat lokal dalam wadah pembangunan yang dimilikinya, dengan menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, Sumodiningrat mengungkapkan dalam paradigma pembangunan partisipatif menuntut adanya pelibatan masyarakat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program yang berhubungan langsung terhadap kehidupan mereka. (Ishak 2016:3)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (*implementasi*) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan dapat diartikan pula sebagai aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek di masyarakat. (Adisasmita 2006:34).

Desa Babalonge adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Desa ini merupakan desa yang berhasil dimekarkan pada tahun 2008 atas dasar aspirasi masyarakat dan inisiatif para tokoh masyarakat yang ada di Desa Babalonge. Seperti wilayah lainnya, desa babalonge sebagai salah satu wilayah yang terus tumbuh dan berkembang telah melaksanakan berbagai pembangunan disegala sektor seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, sosial, politik, kebersihan, namun masih cukup banyak implementasi yang belum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Pembangunan desa diharapkan terciptanya landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendiri. Karena tanpa pembangunan desa dan partisipasi masyarakat yang besar akan mustahil tujuan nasional akan tercapai. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemetaan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, agar pertumbuhan ekonomi dapat cukup tinggi dan stabilitas wilayah tercipta dengan tenteram. Pembangunan desa harus didukung oleh seluruh masyarakat sebab ia tidak saja membutuhkan dana, tenaga dan teknologi tetapi juga membutuhkan pula kesadaran, pengertian dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan selain kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa. Menurut pengamatan penulis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato

masih minim dikarenakan tidak semua anggota masyarakat di Desa Babalonge ikut berpartisipasi dengan berbagai kendala seperti masalah kesibukan pekerjaan. kesadaran dan kepedulian masyarakat terbilang cukup rendah karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsih berupa swadaya hampir sepenuhnya masyarakat hanya bergantung pada pemerintah. Kondisi ini menjadi pokok perhatian antara masyarakat dan pihak pemerintah agar menjalin kerjasama yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi demi mencapai tujuan pembangunan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan masalah di atas yang dituang dalam judul “ **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah partisipasi dalam pembangunan desa

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah desa melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato